



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PA.Llk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lolak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelishakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugatantara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Sangkub, 26 Oktober 1998, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xx,xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nuangan, 29 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxxx xxx, xxxx xxxxxxx xxxxx, Kecamatan Nuangan, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Januari yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lolak pada tanggal Januari dengan nomor /Pdt.G/2022/PA.Llk, telah mengajukan gugatan perceraian, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada hari **Senin, 23 Maret 2015** dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan **Nuangan**, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx Timur,

Halaman 1 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Llk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Utara, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor :

/II/III/2015 tanggal Maret 2015;

2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun I, Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, kemudian pindah ke rumah bersama di alamat yang sama sampai dengan terjadinya perpisahan;

3. Bahwa selama dalam perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Ayu Wandira Kobandaha Binti An Kobandaha** berusia 6 tahun dan dalam asuhan Tergugat;

4. Bahwa awal Pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun pada sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang disebabkan karena;

- a) **Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki yang kurang jelas;**
- b) **Tergugat setiap kali ada pertengkaran sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);**
- c) **Tergugat setiap kali ada pertengkaran sering mengusir Penggugat dari rumah;**

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada **September 2019**, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lolak. Majelis Hakim untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) putus karena perceraian
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan ataupun alasan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- | | | | | |
|-----------------------|-------|------------|----------|-------------|
| 1. Fotokopi | Surat | Keterangan | Domisili | Nomor |
| 102/SKD/20.7/III/2022 | atas | nama | Silvana | Mamontoyang |

Halaman 3 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



dikeluarkan oleh Sangadi xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx,
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx tertanggal 17 Maret 2022, yang
cocok dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen,
diberi kode P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan
ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Nuangan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Timur, Nomor: **II/III/2015 tanggal 23 Maret 2015**, yang cocok
dengan aslinya, bermeterai cukup dan di-nazegelen, kode P.2;

B. Saksi

- . Aliyanti Mamonto binti Ahmad Mamonto, umur tahun, agama Islam,
pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx, Desa
Kuhanga, Kecamatan Bintauna, Kabupaten Bolaang Mongondow
Utara, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi
adalah Adik Kandung Penggugat;
 - Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami
istri yang telah menikah sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai
seorang anak yang bernama Ayu Wandira Kobandaha, anak
tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di
rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun I, Desa
Nuangan, Kecamatan Nuangan, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx
Timur, kemudian pindah ke rumah bersama masih dengan alamat
yang sama, sampai dengan terjadinya perpisahan;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat
pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah
mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan
Tergugat secara terus menerus;
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering
menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain atau berselingkuh
dengan laki-laki yang tidak jelas siapa, Tergugat pernah memukul

Halaman 4 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Penggugat dan setiap bertengkar sering mengusir Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;

□ Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Trisnawati Danggang binti Latuwo Danggang, umur tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xx,xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx,Kabupaten Bolaang Mongondow,dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Sepupu Penggugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah sejak tahun 2018 dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ayu Wandira Kobandaha, anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat yang beralamatkan di Dusun I, Desa Nuangan, Kecamatan Nuangan, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Timur, kemudian pindah ke rumah bersama masih dengan alamat yang sama, sampai dengan terjadinya perpisahan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus;

Halaman 5 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain atau berselingkuh dengan laki-laki yang tidak jelas siapa, Tergugat pernah memukul Penggugat dan setiap bertengkar sering mengusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup berpisah sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dimana Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat dan tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi, tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Bahkan Tergugat sudah tidak pernah menengok Penggugat lagi begitu sebaliknya;
□ Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah memberi saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan keduanya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam dan Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Lolak, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama Lolak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Halaman 6 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatannya, sedangkan Tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek, sebagaimana Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap maka proses mediasi tidak dapat dilakukan, karena mediasi dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir, namun Majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat tetapi Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya dapat disimpulkan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat dengan dalil-dalil sejak tahun 2018 pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan *Tergugat sering menuduh Penggugat telah berselingkuh, Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)* dan setiap kali ada pertengkaran sering mengusir Penggugat dari rumah, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal ayat (1) R.Bg di hubungkan dengan Pasal R.Bg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan Penggugat telah

Halaman 7 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formalsebagaimanaketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan ketentuan pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 20tentang perubahan atas Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah dan secara material akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 (Fotokopi Surat Keterangan Domisili) isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal Penggugat berada di wilayah xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, **bukti** tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga Penggugat dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Lolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuangan, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxTimur, Nomor **III/III/2015 tanggal 23 Maret 2015**, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam ikatan perkawinan sah sejak hari Senin, tanggal 23 Maret 2015, maka Penggugat sebagai *persona standi in judici*memiliki *legal standing* untuk bertindak sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2merupakan akta otentik yang relevan dengan pokok perkara sehingga buktitersebut telah pula memenuhi syaratmaterial, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sesuai Pasal 285 R.Bg.*juncto*Pasal 1870 KUHPdata;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini berdasarkan alasan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun

Halaman8dari14halPutusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dalam rangka membuktikan unsur-unsur alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tentang penyebab dan akibat perselisihan dan pertengkaran itu terhadap keutuhan rumah tangga serta ada tidaknya harapan keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat adalah saksi dari keluarga Penggugat yang sudah dewasa, cakap atau berakal sehat, dan sudah bersumpah menurut tata cara agamanya serta memberikan keterangan di persidangan secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan Pasal 172 R.Bg *junctis* Pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi keluarga atau orang dekat dari Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang secara material sama, pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2019 sudah mulai bertengkar dikarenakan Tergugat sering menuduh Penggugat memiliki pria idaman lain atau berselingkuh dengan laki-laki yang tidak jelas siapa, Tergugat pernah memukul Penggugat dan setiap bertengkar sering mengusir Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, keluarganya sudah mendamaikan tetapi tidak berhasil, merupakan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang mendukung dalil-dalil Penggugat dan dapat diterima sebagai bukti;

Halaman 9 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok serta saling melengkapi antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut memenuhi Pasal 307 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. **Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;**
2. **Bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;**
3. **Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih (tiga) tahun;**
4. **Bahwa setelah berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik lagi;**
5. **Bahwa sudah diusahakan perdamaian baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, namun tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan menerapkan hukumnya (*mengkonstitusir*) dengan mempertimbangkan aspek yuridis sesuai dengan alasan gugatan Penggugat yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang unsur-unsurnya yaitu:

1. *"Antara suami dan isteri"*: fakta hukum pada angka 1 menunjukkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan belum pernah bercerai;
2. *"Terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran"*: fakta hukum pada angka 2, angka 3, dan angka 4, membuktikan bahwa dalam

Halaman 10 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan masalah kekerasan dalam rumah tangga, yakni Tergugat mengancam dan memukul Penggugat yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat tinggal, dan setelah berpisah tempat tinggal, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi;

3. “xxxxx xxx harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga”. Unsur ini secara nyata dan meyakinkan telah terpenuhi oleh fakta hukum pada angka 5 yaitu telah dilakukan usaha perdamaian **baik oleh keluarga maupun oleh Majelis di persidangan, tidak berhasil, karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi pula maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 134 KHI yaitu telah jelas sebab akar permasalahan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dari orang dekat dan keduanya sudah berusaha didamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan: *perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan: *Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang juga selaras dengan firman Allah dalam al-Quran surat ar-Rum ayat 21. Oleh karenanya Penggugat dan Tergugat selayaknya bergaul secara makruf, sebagaimana perintah dalam surat an-Nisa ayat 19;

Menimbang, bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mendapati perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan, maka dapat dikatakan bahwa rumah tangga yang demikian itu telah retak, yang tentu akan sulit bagi keduanya untuk dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas; tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut, karena mempersoalkan siapa yang salah, dalam kerukunan rumah tangga tidak mungkin diwujudkan lagi, hanya

Halaman 11 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan efek negatif bagi kedua belah pihak dan anak-anaknya, serta mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian berpotensi menimbulkan kemudharatan dan hal-hal negatif bagi kedua belah pihak, maka hal-hal tersebut harus dihindari dengan cara perkawinannya diputuskan. Selaras dengan Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim yang berbunyi sebagai berikut:



Artinya: *"mencegah kemudharatan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut diatas juga telah memenuhi normahukum Islam sebagaimana pendapat Wahbah az-Zuhaili (ulama fikih) dalam kitabnya Fiqih Islam wa Adillatuh juz IX halaman yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum, yang berbunyi sebagai berikut:

فإن أثبتت الضرر أو صحة دعواها، طلقها منه

Artinya: *Jika dapat dibuktikan kemudharatan atau kebenaran aduannya, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami kepada isteri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan perceraian yang dikehendaki oleh Penggugat berdasarkan alasan antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang nomor 1 tahun 1974, juncti pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek dengan menjatuhkan talak ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 12 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.LIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua Pasal dalam Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp.000,00 (*Lima ratus lima ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 *Ramadhan 1443 Hijriah*, oleh kami Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H., sebagai Ketua Majelis, Roiha Mahmudah, S.H.I. dan Alfian Muhammady, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan dibantu oleh Ridwan Olii, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Nur Ali Renhoat, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Roiha Mahmudah, S.H.I.

Alfian Muhammady, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Ridwan Olii, S.H.

Perincian biaya :

. Pendaftaran	Rp.000,00
. ATK	Rp75.000,00
. Panggilan	Rp360.000,00

Halaman 13 dari 14 hal Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- . PNBP Panggilan
- . Redaksi
- . Meterai

Jumlah

(Lima ratus lima ribu rupiah)

Rp20.000,00

Rp.000,00

Rp10.000,00

Rp505.000,00

Halaman 14 dari 14 | Putusan Nomor 118/Pdt.G/2022/PA.Lik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)